

## PERUMUSAN HASIL RAKOR DITJEN KEBUDAYAAN 2016

Komisi: 3

Sub Komisi: Sejarah

	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Gagasan Solutif</b>	<b>Rencana Prioritas</b>	<b>Kesepakatan-kesepakatan</b>
<b>Pendataan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Tenaga Ahli</li> <li>2. Kurangnya penggalian sumber sejarah</li> <li>3. Kurangnya perhatian terhadap kajian sejarah lokal</li> <li>4. Kurang optimalnya pendataan sejarah</li> <li>5. belum adanya database yang bersifat online</li> <li>6. Kurangnya pemanfaatan data sejarah untuk kebutuhan guru sejarah</li> <li>7. kurangnya pelibatan masyarakat sebagai sumber sejarah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan even kesejarahan diangkat menjadi program nasional.</li> <li>2. Mengangkat sejarah lokal dalam workshop dengan melibatkan guru sejarah</li> <li>3. Melibatkan Kab/Kota dan komunitas budaya yang ada di Kab/Kota setempat</li> <li>4. Melakukan pemetaan berbasis wilayah</li> <li>5. Melakukan inventarisasi data sejarah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelibatan dosen, guru sejarah , penggiat sejarah dalam kegiatan pembangunan kebudayaan</li> <li>2. pendampingan dari pemerintah pusat dalam penyiapan sertifikasi, kompetensi penulis sejarah</li> <li>3. Kerjasama Pusat dan daerah dalam penyusunan dan penguatan Data Base kesejarahan</li> <li>4. Standarisasi Penulisan Sejarah Lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi pendataan kesejarahan daerah dan pusat</li> <li>2. Sinergi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah</li> </ol>

	<p>8. Kurangnya dukungan dana untuk program kebudayaan</p> <p>9. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas serta komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan kebudayaan</p>	<p>6. Program-program komunitas dan Pemda dalam revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai sejarah</p> <p>7. Memprogramkan kajian sejarah lokal</p> <p>8. Melakukan seminar kesejarahan</p> <p>9. Mengalih media dokumentasi sejarah</p> <p>10. membuat dokumentasi aktivitas kelembagaan berbasis website bidang kesejarahan</p>	<p>5. Pemanfaatan benda-benda peninggalan sejarah sebagai sarana edukasi dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat dan peserta didik</p> <p>6. Dilakukan penguatan jejaring</p> <p>7. kebijakan yang mengikat pemerintah daerah untuk memberikan perhatian baik dari program maupun anggaran bidang kebudayaan dalam hal ini kesejarahan</p>	
--	---	---	---	--

<b>Kompetensi &amp; Sertifikasi Bidang Kebudayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumber daya kebudayaan bidang sejarah masih rendah</li> <li>2) Kurangnya kompetensi sdm dalam penulisan sejarah.</li> <li>3) Belum ada standar kompetensi bidang kesejarahan.</li> <li>4) Perekrutan dan penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>5) Pengalokasian dana untuk peningkatan SDM</li> <li>6) Kurangnya koordinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan bimbingan teknis kesejarahan.</li> <li>2) Kerjasama dengan perguruan tinggi</li> <li>3) Memfasilitasi sejarawan dalam melakukan dialog dengan pemda setempat</li> <li>4) Membangun kerjasama dengan guru, dosen, peneliti, dan penggiat sejarah dalam penulisan dan riset bidangsejarah</li> <li>5) Pemetaan Sumberdaya Kesejarahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlu rekrutmen dan penempatan pegawai negeri sejarah, sosiologi dan antropologi</li> <li>2) Pengalokasian dana untuk peningkatan SDM kesejarahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian insentif dan beasiswa untuk tenaga kesejarahan baik di tingkat prov maupun kab/kota.</li> <li>2) Komitmen sinergi program pusat dan daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM kesejarahan</li> </ol>
---	---	--	--	---

<b>Mobilisasi Sumberdaya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>2. Kurangnya informasi dari pemerintah pusat ke daerah tentang kegiatan kesejarahan</li> <li>3. belum adanya Peraturan daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi program-program pusat dan daerah</li> <li>2. pemberian insentif kepada penggiat sejarah</li> <li>3. Mempercepat proses terbitnya undang-undang kebudayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan pusat dengan daerah untuk menyatukan visi dan misi secara intensif</li> <li>2. Terbentuknya MoU antara pusat dengan daerah dalam pengelolaan bidang kesejarahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebudayaan seharusnya menjadi kementerian yang berdiri sendiri begitu juga dengan dinas Provinsi</li> <li>2. Peningkatan pelibatan komunitas sejarah baik di pusat dan daerah</li> </ol>
<b>Pemantapan Tata Kelola</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang berkembangnya penelitian sejarah di tingkat lokal</li> <li>2. nomenklatur kebudayaan yang bervariasi menimbulkan perbedaan beban kerja dan menyulitkan koordinasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya terobosan pada bidang tata kelola kebudayaan antara pemerintah pusat dengan daerah.</li> <li>2. memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah.</li> <li>3. Memberikan ruang khusus sebagai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya MoU antara pusat dengan daerah</li> <li>2. Menghasilkan Perda yang berkaitan dengan kebudayaan.</li> </ol>	<p>regulasi dan kebijakan tata kelola bidang kesejarahan nasional.</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Banyaknya peristiwa sejarah di tingkat lokal yang belum ditulis.</li><li>4. Banyaknya pencurian dan penjualan naskah kuno sejarah.</li><li>5. Kurangnya konservasi naskah kuno sejarah</li></ol>	<p>apresiasi masyarakat yang memberi kontribusi sejarah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pemantapan dan penataan sistem administrasi bidang tata kelola kebudayaan.</li></ol>		
--	---	---	--	--